

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Putusan MA No 121 K/PID.SUS/2020 dan Putusan MA No 130 PK/PID.SUS/2013 menunjukkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung kurang tepat dalam menyatakan Karen Agustiawan, Fachrudin Yasin, dan Roy Achmad Ilham tidak bersalah karena memenuhi doktrin *Business Judgement Rule* karena dalam Putusan MA No 121 K/PID.SUS/2020 Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan Karen Agustiawan memenuhi doktrin yaitu tidak adanya unsur kecurangan (*freud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja. Akan tetapi unsur *freud* dan perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan tergolong dalam unsur yang mana dalam doktrin *Business Judgement Rule* diatur di Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 5 ayat (3) UU BUMN dan Pasal 25 PERMEN BUMN No 1 Tahun 2011. Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak mencantumkan Pasal 97 ayat (5) huruf a dan c yang mana pasal tersebut mengatur unsur kesalahan yang disengaja dan *conflict of interest* sedangkan terdapat asas hakim dalam memutuskan harus memuat alasan yang rinci dan jelas. Putusan MA 130 PK/PID.SUS/2013 menyatakan novum telah menunjukkan Fachrudin Yasin dan Roy Achmad Ilham telah memenuhi prinsip kehati-hatian dalam doktrin *Business Judgement Rule* sedangkan kedua terpidana bukan subyek hukum Direksi, tidak berwenang mengambil keputusan Direksi, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak menjelaskan secara rinci mengenai unsur yang terpenuhi dan tidak mencantumkan pasalnya.

2. Parameter doktrin *Business Judgement Rule* dapat dilihat dari subyek dan obyek hukum doktrin yaitu Direksi dan keputusannya. Apabila penjelasan mengenai subyek dan obyek hukum doktrin dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas belum jelas maka dapat berpedoman

dengan pendapat ahli hukum dan peraturan lainnya seperti Pasal 5 ayat (3) UU BUMN dan Pasal 25 PERMEN BUMN No 1 Tahun 2011. Akan tetapi Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak mengupayakan hal tersebut sehingga Fachrudin Yasin dan Roy Achmad Ilham dianggap subyek hukum Direksi dan persetujuan dari mereka menjadi obyek hukum doktrin sehingga memenuhi unsur prinsip kehati-hatian. Apabila melihat penerapan doktrin *Business Judgement Rule* dalam dua putusan tersebut, maka kedua putusan ini belum bisa menjadi pembentukan Yurisprudensi karena tidak memenuhi persyaratan dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan MA No 121 K/PID.SUS/2020 dan Putusan MA No 130 PK/PID.SUS/2013 menunjukkan penerapan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak tepat mengakibatkan terjadi perbedaan konsep dengan kenyataan praktik hukum.

5.2 Saran

1. Diperlukan adanya pemahaman lebih oleh aparat penegak hukum mengenai doktrin-doktrin dalam Hukum Perusahaan. Penerbitan literasi dalam bentuk Buku atau Pedoman tentang doktrin-doktrin Hukum Perusahaan bagi Direksi dan jajarannya di BUMN juga dapat meningkatkan pemahaman terkait doktrin-doktrin Hukum Perusahaan yang sedang berkembang.
2. Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat mempertimbangkan dengan bijak antara *mens rea* dan *actus reus* yang dilakukan oleh seseorang, sebab untuk menilai apakah seseorang dapat dibebani doktrin *Business Judgement Rule* atau tidak, aparat penegak hukum juga harus melihat adakah niat jahat yang sejalan dengan perbuatan seseorang yang bertentangan dengan doktrin *Business Judgement Rule*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002.

Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule (Praktik Pengadilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD)*, Jakarta: PT Grasindo, 2019.

Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris*, Jakarta: Forum Sahabat, 2007.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: 2014.

Nurjihad, *Menggugat Business Judgment Rule Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Kritik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustiawan)*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019.

Ridwan Mansyur, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia, 2015, dalam <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/34.pdf>.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

B. Makalah/Seminar/Jurnal

Ade Adhari, *Kebijakan Formulasi Kualifikasi Yuridis Terhadap Delik Dalam Undang-Undang Yang Lahir Dalam Kurun Waktu 2014-2015*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017, dalam <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/download/331/330#:~:text=Dengan%20meminjam%20makna%20masalah%20yuridis,sistem%20pidana%20yang%20sedang%20berlaku>), diakses pada 22 Juli 2022, diakses pada 25 Juli 2022.

Andrew S. Gold, *A Decision Theory Approach To The Business Judgment Rule: Reflections on On Disney, Good Faith, And Judicial Uncertainty*, Jurnal Maryland Law Review, Volume 66, Faculty Of Law, University Of Maryland, College Park, Maryland, 2007.

Bewani Octavianisa Masruah, *Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan Business Judgement Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2019, dalam <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1641729&val=14493&title=KONSEP%20ITIKAD%20BAIK%20DALAM%20PENERAPAN%20BUSINESS%20JUDGMENT%20RULE%20BERDASARKAN%20SISTEM%20HUKUM%20PERSEROAN%20INDONESIA%20DAN%20MALAYSIA>, diakses pada 24 Juli 2022

Dhaifina Fitriani, *Perlindungan Direksi Melalui Business Judgement Rule (Studi Analisis Kasus Karen Agustiawan Mantan Dirut Pertamina)*, Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 2, 2020, dalam <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/2876/1530>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.

Dora Dominica, *Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Pengambilan Keputusan Oleh Direksi Bumn Persero ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2021, dalam <http://repository.uph.edu/cgi/users/login?target=http%3A%2F%2Frepository.uph.edu%2F29086%2F5%2FCHAPTER%25202.pdf>, diakses pada 10 Juni 2022.

Elia Fransisco Silitonga, Sunarmi, dan Mahmud Siregar, *Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Direksi Perseroan (Analisis Putusan No.915 K/Pdt/2017 dan No.83/Pdt.G/2016/PN.Sby)*, Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2022, dalam <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/25/22>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

Enrico Simanjuntak, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Tahun 2019, dalam <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1615/426>, diakses pada 21 Juli 2022

Hari Sutra Disemadi, *Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 10, No.1, 2020, dalam <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/11006/5935>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.

Heikhal A.S Pane, *Penerapan Uitvoerbaar Bij Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Kasus: Putusan Perkara Perdata Register Nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm 11

Helmi Kasim, *Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgment Rule*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2, 2017, dalam

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/14210/323>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.

Indriyani Kusumawati dan Yeti Sumiyati, *Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum karyawan Karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam Secara Sepihak*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2021, dalam

<https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/3880/2013>, diakses pada 3 April 2022.

Kristanto, *Analisis Pemahaman Konsep Business Judgment Rule menurut Hukum Indonesia Terhadap Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Juli 2010, dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131418-T%2027500-Analisis%20pemahaman-Analisis.pdf>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

Maria Magdalena Ine Sambikakki, Tesis: *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014)*, (Yogyakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020), dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/20661/05.3%20bab%203.pdf?sequence=18&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022.

Muhamad Hafizh Akram dan Nisriina Primadani Fanaro, *Implementasi Doktrin Business Judgement Rule Di Indonesia*, Jurnal Ganesha Law Review, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, dalam <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/download/21/23>, diakses pada 24 Juli 2022.

Prof. Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997, dalam <https://jdih.banyuwangikab.go.id/ebook/upload/ebook/peranan-yurisprudensi.pdf>, diakses pada 22 Juli 2022

Putu Anantha Pramagitha dan A A Ketut Sukranatha, *Prinsip Business Judgment Rule sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi Bumn*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 12, 2019, dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52055/30833>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

Robin Panjaitan, Martono Anggusti, dan Roida, *Penerapan Prinsip Business judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan*, Patik: Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021, hlm 9, dalam <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/217/341>, diakses pada tanggal 3 April 2022

Sarah Pratiwi Putri Siregar, *Perlindungan Hukum Bagi Direksi Yang Beritikad Baik*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 65.

Shigeko Desiputri Hadi, Aam Suryamah, dan Anita Afriana, *Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2021, hlm 177, dalam <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/553/361>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022

Soerya Respationo dan Guntur Hamzah, *Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Yustisia, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, hlm 105, dalam <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10194/9092>, diakses pada 22 Juli 2022

Teddy Anggoro, *Akibat Hukum Yang Timbul Karena Tidak Dilakukannya Pemberitahuan Kepada Menteri Oleh Direksi Baru Atas Pengangkatan Dirinya Sendiri*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm 16, dalam <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/130275-T%2027105-Akibat%20hukum-Literatur.pdf>, diakses pada 3 April 2022.

Tria Noverisa, *Penerapan Business Judgment Rule Bagi Direksi PT Penanaman Modal Asing Sebagai Pembelaan Dalam Kerugian Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 5.

Virginijus Bite dan Gintare Gumuliauskiene, *The Business Judgment Rule In Lithuania*, Jurnal Eur Bus Org Law Rev, Tahun 2016, hlm 562, dalam https://library.unej.ac.id/repository/10.1007_s40804-016-0052-0.pdf, diakses pada 25 Juli 2022.

Yafet Yosafet Wilben Rissy, *Business Judgment Rule (Ketentuan dan Pelaksanaannya Oleh Pengadilan di Inggris, Kanada Dan Indonesia)*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 32, No. 2, 2020, dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/56117/29616>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2021.

Yuniar Sari Rusera, *Analisis Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Perkara Perdata No. 48/PDT.G/2015/PN/PLG Tentang Wanprestasi Perjanjian Pemberian Imbalan Jasa*, Skripsi, <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4484/2/BAB%20II%20-%20Lampiran-dikonversi.pdf>

C. Website/Internet

Ade Rizky Fachreza, *Yurisprudensi Dan Kemerdekaan Hakim Dalam Kaitannya dengan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan Indonesia*, dalam <https://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-dalam-peradilan-indonesia/>, diakses pada 2 April 11.00 WIB.

Aji Prasetyo, *Business Judgment Rule Alasan di Balik Lepasnya Eks Dirut Pertamina di Tingkat Kasasi*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ibusiness-judgment-rule-i--alasan-di-balik-lepasnya-eks-dirut-pertamina-di-tingkat-kasasi-lt5e69546a7fe7c/?page=2>, diakses pada 24 Juli 2022.

Bank Mandiri, Tentang Kami, dalam <https://www.bankmandiri.co.id/web/guest/profil-perusahaan>, diakses pada 23 Juli 2022.

Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, *Asas-asas Putusan Hakim,* <https://drive.google.com/file/d/1M-33KLWtKRRSH80SwHt880DuGanfc5t1/view?pli=1>, diakses 2 Agustus 2022.

M. Hanafiah Harahap, *Analisis Unsur Melawan Hukum Terhadap Perbuatan Yang Menjalankan Peraturan Perundang-Undangan (Analisa Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013 dengan Terpidana Fachrudin Yasin dan Roy Achmad Ilham),* MaPPI FHUI, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/03/Buku-Klinik-Antikorupsi-Final-versi-07112015.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

Mochamad Basarah, *Prospektif Sistem Peradilan Di Indonesia,* dalam <https://media.neliti.com/media/publications/25221-ID-prospektif-sistem-peradilan-di-indonesia.pdf>, diakses pada 2 April 10.00 WIB.

PT Pertamina, Tentang Kami, dalam <https://www.pertamina.com/id/siapa-kami>, diakses pada 23 Juli 2022

Vidya Prahassacitta, *Kedudukan Yurisprudensi Dalam Putusan Hakim,* dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/kedudukan-yurisprudensi-dalam-putusan-hakim/>, diakses pada 21 Juli 2022

Wigati Pujiningrum, *Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi,* dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022.

D. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Rechreglement voor de Buitengewesten (RBG).

Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).